



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BIMO ADI NURSANTHYASTO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **628309**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.023.494.240**

1. Tanah Seluas 5 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 4 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah Seluas 4 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m2/25 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 3 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. Tanah Seluas 3 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
7. Bangunan Seluas 34 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
8. Bangunan Seluas 34 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 9.000 m2/23 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 280.080.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 9.000 m2/38 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.506.800
11. Tanah dan Bangunan Seluas 9.000 m2/38 m2 di KAB / KOTA



TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 492.907.440

12. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/60 m2 di KAB / KOTA

BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **550.900.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 Q HYBRID CVT

TSS MODELISTA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 550.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **1.133.055.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **800.137.218****F. HARTA LAINNYA** Rp. **184.955.958****Sub Total** Rp. **7.692.542.416****III. HUTANG** Rp. **----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **7.692.542.416**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
UNIT KERJA : UNIT HUKUM DAN KEPATUHAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : AGUNG DODIT MULIAWAN
- Jabatan** : KEPALA UNIT HUKUM DAN KEPATUHAN
- NHK** : 898571

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.052.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
- Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 252.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ---

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 692.145.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 444.908.924

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.189.053.924

III. HUTANG Rp. 106.250.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.082.803.924

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PERENCANAAN DAN PERTANAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MIA AMALIA
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG PERENCANAAN DAN PERTANAHAN
3. NHK : 865428

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.048.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 877.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.041.000.000
3. Bangunan Seluas 72 m2 di KAB / KOTA BEKASI, LAINNYA Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 459.950.000

1. LAINNYA, POLIGON ROAD BIKE DAN CITY BIKE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS CROSS HYBRID Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 449.950.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.740.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 122.952.225

F. HARTA LAINNYA Rp. 120.000.000

Sub Total Rp. 4.490.902.225

III. HUTANG Rp. 272.067.200

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.218.835.025

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG SOSIAL, BUDAYA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALIMUDDIN
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG SOSIAL, BUDAYA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3. NHK : 476842

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.590.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/250 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 18.750 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 18.750 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 12.500 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 2 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
8. Tanah Seluas 384 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
9. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
10. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
11. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER



UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

12. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER

UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

13. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER

UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

14. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER

UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

15. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER

UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

16. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER

UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

17. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER

UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

18. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER

UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

19. Tanah Seluas 660 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL

SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

402.220.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

100.000.000

2. MOTOR, YAMAHA BKU-SAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

22.000.000

3. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

280.220.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

10.515.493

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

5.002.735.493

III. HUTANG

Rp.

396.911.921

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.605.823.572

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNIT KERJA : PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUNG INDRAJIT
2. Jabatan : KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 945202

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/70 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m²/45 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m²/96 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 213.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS/RAIZE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 213.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 195.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 392.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 450.500.000

Sub Total Rp. 5.650.500.000

III. HUTANG Rp. 1.415.861.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.234.639.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MYRNA ASNAWATI SAFITRI
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM
3. NHK : 211880

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	7.958.313.690
1. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 565.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 565.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000		
4. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , WARISAN Rp. 1.075.000.000		
5. Tanah Seluas 12.000 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , WARISAN Rp. 1.350.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/50 m2 di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp. 553.313.690		
7. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/74 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000		
8. Tanah dan Bangunan Seluas 32 m2/32 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.073.480.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	374.179.426
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	206.167.447



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.612.140.563
III. HUTANG	Rp.	194.953.507
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.417.187.056

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUDIRO ROI SANTOSO**
2. Jabatan : **PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI MADYA**
3. NHK : **522684**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.068.300.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/114 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 1.068.300.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 620.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA HR-V RU1 1.5 E CVT CKD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V 1.5 TC PRESTIGE CVT. CKD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 765.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 750.000.000

Sub Total Rp. 3.253.300.000

III. HUTANG Rp. 680.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.573.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : DANIS HIDAYAT SUMADILAGA
- Jabatan** : DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA
- NHK** : 130705

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	11.174.887.100
1. Tanah Seluas 1.275 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 291 m2/58 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 850.550.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 336 m2/242 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.950.465.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 614 m2/133 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.853.872.100		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/118 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.105.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	90.000.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	42.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	74.779.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.571.508.960
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	15.953.175.060
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	15.953.175.060



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.